

SOSIAL & BUDAYA

SYAR-I

Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat

Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan & Anisa Ashari

Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Terkait Covid-19 Perspektif Ilmu Perundang-Undangan

Tigor Einstein, Muhammad Isha Helmi & Ahmad Ramzy

Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penanganan Covid-19

Raines Wadi

Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19

Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah & Khaerul Aqbar

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Rindam Nasruddin & Islamul Haq

Psikoterapi Spiritual dan Pendidikan Islam dalam mengatasi dan menghadapi gangguan Anxiety Disorder di saat dan pasca Covid-19

Yono, Indriya Rusmana & Hilda Noviyanty

Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penanguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?)

Hudzaifah Achmad Qotadah

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah*

Rindam Nasruddin¹, Islamul Haq²

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare



[10.15408/sjsbs.v7i7.15569](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569)

Abstract

The covid-19 epidemic worried the Indonesian people because there were many people who needed the transmission virus. Because the government adopted the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy as a step to reduce or break the Covid-19 distribution chain. This research is a qualitative study using empirical literature. This research was conducted by examining data consisting of documents related to research, as well as seeing, listening to, as well as understanding social conversations in the community. The results of the study stated that there are provisions of this PSBB, which can be obeyed by the Indonesian people because as we know about Corona Virus (Covid-19) this is a real threat and cannot be reversed. However, the people whose livelihoods are officially informally are asking for ways to fulfill their daily needs. It would be nice if the government considers the lives of lower class people who are trying to meet basic needs and ensure the availability of goods and people who are able to provide them.

Keyword: Epidemic, PSBB, covid -19

Abstrak

Wabah covid-19 membuat masyarakat Indonesia khawatir karena banyaknya warga yang terkena dampak penularan virus tersebut. Oleh karenanya pemerintah mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah untuk mengurangi atau memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Secara metodologis, penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur empiris. Pendekatan dilakukan dengan cara menelusuri data-data berupa dokumen yang terkait dengan penelitian, serta melihat, mendengar, sekaligus memahami gejala sosial yang ada di masyarakat. Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan adanya peraturan PSBB ini, bisa ditaati oleh masyarakat Indonesia karena seperti yang kita ketahui bahwa ancaman Virus Corona (Covid-19) ini merupakan ancaman yang benar-benar nyata dan tidak memandang kalangan bawah hingga kalangan atas sekalipun. Namun, masyarakat yang mata pencahariannya disektor informal merasa kebingungan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Alangkah baiknya jika pemerintah memikirkan kehidupan masyarakat kelas bawah yang kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta menjamin bahwa barang tersedia dan masyarakat mampu mengaksesnya.

Kata Kunci : Wabah, PSBB, Covid -19

*Diterima: 11 April 2020, Revisi: 22 Mei 2020, Diterbitkan 12 Juni 2020.

¹ **Rindam Nasruddin** adalah dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. E-mail: rindamjie@gmail.com

² **Islamul Haq** adalah dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. E-mail: islamulhaq@iainpare.ac.id

Pendahuluan

Masyarakat tengah dihebohkan dengan pemberitaan mengenai virus corona atau virus yang mematikan. Coronavirus adalah sekumpulan virus dari *subfamili Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan ordo *Nidovirales*. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia Coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; *SARS*, *MERS*, dan *Covid-19* sifatnya lebih mematikan.

Kondisi saat ini virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja tanpa memperhatikan diri untuk menjaga kesehatan. Jika dilihat dari gejalanya, orang yang tanpa pengetahuan lebih akan mengiranya hanya sebatas *influenza* biasa atau penyakit ringan saja, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Saat ini di tahun 2020, perkembangan permulaan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk negara kita sendiri, Indonesia.

Pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Meskipun banyak fasilitas umum yang ditutup, namun beberapa sektor vital seperti fasilitas kesehatan, pasar atau minimarket tetap buka selama PSBB. Masyarakat pun mendukung opsi tersebut karena dianggap mampu mencegah penularan penyakit namun tetap menjaga daya beli masyarakat.

Langkah PSBB adalah strategi yang efektif untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Tentu saja hal ini harus didasari oleh kesadaran masyarakat untuk tidak berkumpul dan tetap mematuhi protokol yang ada ketika berada diluar rumah. Langkah PSBB lebih tepat jika dibandingkan dengan *Lockdown*, karena masyarakat sama sekali tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, segala transportasi mulai dari mobil, motor, kereta api, hingga pesawat pun tidak dapat beroperasi, dan bahkan aktivitas perkantoran bisa dihentikan semuanya jika terjadi *Lockdown*, maka dari itu langkah PSBB jauh lebih baik diterapkan.

Hampir seluruh kegiatan dirumahkan dan kebijakan ini disebut dengan PSBB. PSBB itu sendiri merupakan singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hal ini merupakan salah satu strategi pemerintah dalam pencegahan virus corona. PSBB dapat membantu mencegah penyebaran virus corona ke suatu tempat wilayah, sehingga masyarakat yang berada di suatu wilayah tersebut diharapkan dapat terhindar dari wabah yang cepat menyebar tersebut. Kebijakan ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara ketat sebelumnya ke beberapa wilayah dan mempertimbangkan konsekuensinya secara matang, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Maka dari itu masyarakat di Indonesia diharapkan bahwa dengan diberlakukannya PSBB tersebut, masyarakat juga turut berkontribusi dan menaati pemerintah agar penyebaran Covid-19 bisa berhenti, dan mampu melindungi orang-orang dari penularan Covid hingga kasus terakhir. Namun, tentu saja tidak ada kebijakan yang berhasil tanpa adanya kerja sama dari masyarakat itu sendiri.

Saat ini, kenyataan yang terjadi di lapangan, masih banyak masyarakat yang tidak mendengarkan anjuran pemerintah. Hal ini bukan tanpa alasan melainkan suatu keadaan yang memaksa mereka untuk tidak berdiam diri di rumah, salah satunya karena di Indonesia sendiri begitu banyak masyarakat yang pekerjaannya tidak menetap di rumah, seperti kuli bangunan, petani, para ojol dan lainnya, dan banyak juga masyarakat kita yang berkehidupan melalui usaha mikro seperti pedagang kaki lima, tentunya berdampak bagi yang pekerja nonformal tersebut.

Terdapat beberapa riset sebelumnya yang telah dilakukan terkait masalah ini di antaranya adalah riset yang dilakukan oleh Wibowo Hadiwardoyo mengenai kerugian ekonomi nasional akibat PSBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang diperlukan adalah kebijakan yang tepat, baik secara lokasi, waktu maupun prosedurnya. Apabila PSBB dapat menjamin putusannya rantai penularan Covid-19, maka lakukanlah dengan benar, dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pembatasan yang berkepanjangan, atau berpindah-pindah lokasi karena tidak serempak, berisiko melampaui batas kemampuan survival individu maupun entitas bisnis. Bila itu yang terjadi, maka penyelamatan tidak dapat dilakukan, dan kerugian akan semakin besar baik secara ekonomi maupun sosial.³

Selanjutnya riset dilakukan oleh Wahyudi mengenai dampak positif PSBB bagi lingkungan hidup. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan aturan PSBB ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Pemerintah Indonesia tidak menerapkan kebijakan *lockdown* hanya menerapkan *social distancing* berskala luas yang dikenal dengan PSBB (Pembatasan sosial berskala besar). Dengan penerapan PSBB ini, kita tidak hanya mendapatkan harapan bebasnya warga dari Covid-19 tetapi juga kualitas lingkungan yang lebih baik.⁴ Kemudian riset yang dilakukan oleh Sylvia Hasanah Thorik mengenai Efektivitas pembatasan sosial berskala besar di Indonesia dalam penanggulangan Pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSBB diyakini merupakan cara paling ampuh untuk menekan laju penularan pandemi Covid-19. Hal ini dapat kita lihat dalam berbagai langkah yang diambil pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dengan menganjurkan atau menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan pada sektor-sektor tertentu termasuk juga menekan kepada masyarakat untuk menunda terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang banyak orang. Disisi lain, kondisi ini hampir menghentikan aspek kehidupan sehari-hari, perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya.⁵

Riset yang dilakukan oleh Annissa Rezki mengenai kebijakan pemberlakuan *lockdown* sebagai antisipasi penyebaran corona virus Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan *lockdown* dalam suatu wilayah yang terdampak wabah

³ Wibowo Hadiwardoyo, *kerugian ekonomi nasional akibat PSBB*, (Jurnal of Business and Entrepreneurship 2, No 2, 2020), h.90.

⁴ Wahyudi, *kebijakan pemberlakuan lockdown sebagai antisipasi penyebaran corona virus covid-19*, (Universitas Sumatra Utara : 2020), h.9.

⁵ Sylvia Hasanah Thorik, *Efektivitas pembatasan sosial berskala besar di Indonesia dalam penanggulangan Pandemi Covid-19*, (Jurnal : Hukum dan Keadilan, 4 No, 1, 2020), h.118.

virus corona perlu dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyebaran wabah virus tersebut, walaupun tentunya menimbulkan dampak negatif yang berisiko pada tatanan perekonomian negara. Dalam pelaksanaan *lockdown* ini perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat tanpa membatasi agama, kalangan, dan profesi.⁶

Di antara riset yang telah di sebutkan diatas, belum ada yang membahas mengenai dampak PSBB terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini terkonsentrasi pada dampak PSBB terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang stimulasi dan kejadian faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja.⁷ Penelitian ini menyajikan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang akan diamati, karena peneliti bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.

Metode kualitatif ini merupakan metode literatur dan empiris. Selain melakukan pengujian fakta di lapangan sebagai *das sein* terhadap teori hukum dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai pedoman yang berlaku atau *das sollen*. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat.⁸

Pembahasan

Pandemi Covid-19 ini memang tidak dapat dipandang sebelah mata karena sudah menyebar sangat cepat diseluruh dunia dan menyebabkan sebuah kepanikan di masyarakat. Hal ini tentu menjadi dampak besar terhadap perekonomian. Karena begitu banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia ini maka, pemerintah pun melakukan gerakan PSBB.

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam kondisi keterbatasannya, tetap membutuhkan orang lain untuk mendukung kehidupannya. Pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) telah disampaikan oleh pemerintah, dalam hal ini seperti perliburan sekolah, penutupan kantor, pembatasan kegiatan keagamaan, dan lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi orang yang terjangkit wabah virus Covid-19.

⁶ Nur Rohim Yunud dan Annissa Rezki, *Kebijakan Pemerintah Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*, (Jurnal : Sosial & Budaya Syar-i 7, No.3, 2020),h.228.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 6.

⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Cet. I; Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 157.

Kebijakan yang dibuat pemerintah seperti *Social distancing* dan PSBB tentu saja menyebabkan berlakunya WFH (*work from home*) bagi para pekerja. Namun lain halnya dengan para pekerja seperti pedagang, buruh, tukang becak, tukang ojek dan yang lainnya, yang tidak bisa menerapkan kebijakan WFH tersebut dan merekalah yang paling terkena imbasnya.⁹

Pemberlakuan kebijakan PSBB tersebut memuai reaksi yang beragam dimasyarakat. Mayoritas warga mengeluhkan dampak yang dialami seperti sulitnya ekonomi karena tidak dapat bekerja seperti biasa sehingga segala kebutuhan hidupnya tidak dapat terpenuhi dengan baik khususnya masyarakat kelas bawah. Fisik yang menurun akibat ruang gerak yang dibatasi serta efek psikologis akibat perasaan khawatir yang berlebihan terhadap virus ini.

Upaya pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan virus corona saat ini cukup membuat khawatir masyarakat. Bukan hanya khawatir terjangkit virus corona saja, tetapi kebijakan pemerintah yang memberlakukan PSBB untuk beberapa wilayah. Hal ini akan menyulitkan masyarakat dalam melakukan kegiatan dan mobilitasnya. Hal ini meskipun beresiko besar, tetapi harus dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran virus corona tersebut.

Kebijakan yang membatasi aktivitas masyarakat ini memang tidak mudah untuk dijalankan, terlebih bagi masyarakat yang mata pencahariannya disektor informal. Masyarakat yang mata pencahariannya disektor informal akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya para pengemudi ojek online, selain mereka harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka juga mempunyai beban kredit motor. Kondisi PSBB otomatis mengurangi pendapatan mereka.

Persoalan lain ekonomi setelah diberlakukannya PSBB, adalah persoalan menurunnya pendapatan masyarakat, yang menyebabkan turunnya daya beli. Artinya masyarakat tidak mampu membeli bahan kebutuhan sehari-hari. Jangankan membayar cicilan kredit atau utang, membeli beras saja sudah terasa berat. Jika PSBB dilakukan dengan ketat agar dapat berhasil mencegah wabah meluas, maka mobilitas masyarakat semakin terbatas, yang dapat semakin menyulitkan kondisi ekonominya. Persoalan ekonomi jangka pendek yang harus disiapkan strategi mitigasinya oleh pemerintah daerah, adalah kemampuan masyarakat mengakses bahan pangan khususnya bahan pangan pokok menjadi sangat lemah bahkan habis.

Meskipun sebagian masyarakat masih merasa aman-aman saja dari segi pendapatan, seperti pegawai negeri, atau pegawai perusahaan yang kuat bertahan, namun tidak dapat diabaikan bahwa sebagian masyarakat menggantungkan hidup dari usaha dan sektor informal yang kemudian tutup usaha, juga masyarakat yang bekerja di sektor formal yang kemudian diberhentikan. Selain itu, persoalan pelik lainnya yang harus menjadi perhatian adalah ketersediaan bahan pangan itu sendiri,

⁹ Asih Nurjanah, *Perubahan sosial-ekonomi akibat pandemi covid-19*, <https://www.kompasiana.com/asihftrn177793/5e994497d541df77e05aad82/perubahan-sosial-ekonomi-akibat-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 05 Mei 2020.

terutama jika daerah yang menerapkan PSBB bukanlah penghasil pangan yang cukup dan tergantung pada daerah lain.

Sebelum menerapkan PSBB alangkah baiknya jika pemerintah memikirkan kehidupan masyarakat kelas bawah yang kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah seharusnya menjamin bahwa barang tersedia di daerah PSBB, dan masyarakat mampu mengaksesnya. Pemerintah juga harus mengetahui data yang akurat seberapa banyak keluarga yang tidak mampu mengakses barang kebutuhan pokok selama ini.¹⁰ Hal yang terpenting pemerintah menyiapkan kebijakan dan anggaran yang cukup untuk keadaan yang terburuk. Strategi ini tampak biasa, namun pada pelaksanaannya bukanlah hal yang mudah.

Ketersediaan pangan, menjadi hal krusial karena beberapa daerah yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pangan yang berasal dari luar daerah. Meskipun masyarakat memiliki ketersediaan pangan, namun dengan kondisi psikologi masyarakat sangat buruk, penuh kekhawatiran, apalagi disaat usaha dan pekerjaan hilang.

Seperti yang dialami oleh ibu Nasirah selaku pedagang sayuran yang mengatakan bahwa:

“Adanya aturan dari pemerintah tentang PSBB sangat berdampak pada dagangan saya. Hal itu di karenakan pasar yang lebih cepat ditutup setiap harinya, sehingga memberikan dampak pada jualan saya. Hal ini sangat berpengaruh kepada penghasilan saya, dikarenakan peraturan PSBB ini serta beberapa masyarakat merasa khawatir untuk berbelanja dikarenakan rasa kekhawatiran mengenai virus corona tersebut. Jalan satu-satunya saya harus menjual jualan saya dengan harga yang murah agar jualan tersebut tidak rusak, sehingga penghasilan saya setiap harinya berkurang.”¹¹

Dari pantauan ini maka terlihat bahwa adanya instruksi mengenai PSBB yang paling menderita adalah para pekerja harian dan kelompok masyarakat kelas bawah, salah satunya kalangan pedagang yang mengharuskan mereka menjual jualan mereka dengan harga murah dan sejak adanya instruksi PSBB pembeli dan pelanggan mereka juga ikut berkurang.

Dampak PSBB terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Penerapan PSBB hanya meningkatkan dari upaya *Social distancing* yang sudah dianjurkan oleh pemerintah sebelumnya. Pemerintah ingin memperluas dan mempertegas daripada kebijakan sebelumnya melalui PSBB.¹² Efek samping dari diberlakukannya PSBB tersebut yaitu para pengusaha dan masyarakat lainnya

¹⁰Rahma Ainun Mardiyah, dan R Nunung Nurwati, *Dampak pandemi covid-19 terhadap peningkatan angka pengangguran di Indonesia*, (Universitas Padjadjaran, 2020), h.19.

¹¹Nasirah (46), Pedagang, Wawancara dilakukan oleh peneliti, 27 April 2020.

¹² Dwi Aditiya Putra, *PSBB tak berdampak besar ke ekonomi Indonesia*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4221693/psbb-tak-berdampak-besar-ke-ekonomi-indonesia>, diakses pada tanggal 05 Mei 2020.

menanggapi bahwa PSBB dapat menyebabkan sejumlah industri dan mata pencaharian menjadi tersendat.

Dampak langsung PSBB akan sangat terasa bagi masyarakat yang bekerja di sekitar informal. Sejak adanya instruksi PSBB mereka menjadi kehilangan penumpang dan pelanggan orderan makanan juga ikut berkurang, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Seperti yang dialami oleh bapak Nasruddin selaku pekerja sebagai Ojol yang mengatakan bahwa:

“Adanya aturan dari pemerintah tentang PSBB membuat saya merasakan kesulitan khususnya dalam hal ekonomi. Hal ini dikarenakan pekerjaan saya sebagai ojol mengharuskan saya untuk tetap keluar mencari nafkah, dan dampak lain yang saya rasakan dari efek PSBB adalah penghasilan yang sangat sulit didapatkan setiap harinya, dikarenakan masyarakat saat ini mengikuti aturan pemerintah untuk membatasi mereka melakukan aktifitas diluar rumah.”¹³

Situasi inilah yang sangat perlu diperhatikan pemerintah. Dengan adanya PSBB yang juga ikut meliburkan kantor maka efeknya sangat terasa pada masyarakat kelas menengah bawah yang upayanya harian, pedagang asongan dan sebagainya. Jadi rantai pasok ekonomi sangat terasa dampaknya. Seharusnya sebelum diajukan PSBB tersebut sebaiknya bantuan tersebut sudah cair kepada orang miskin, maupun ke pekerja-pekerja informal.

PSBB juga akan terasa dampaknya pada dunia usaha, karena sektor usaha lainnya di luar sektor penyedia kebutuhan dasar yang ditetapkan dalam Permenkes Nomor 9 tahun 2020 terancam mati. Pasalnya PSBB tersebut akan menurunkan kinerja perusahaan dan juga permintaan yang cukup signifikan. Jadi proyeksikan sektor-sektor usaha di luar sektor akan dikecualikan dalam Permen PSBB akan mengalami penurunan kinerja yang lebih dalam hingga mendekati dormant atau mati. Sementara, bagi sektor yang masih diperbolehkan untuk beroperasi diproyeksi juga akan mengalami penurunan permintaan dari pasar. Karena, dengan adanya PSBB, aktivitas-aktivitas perkantoran atau perusahaan yang saat ini masih bisa bekerja karena permintaan pasar akan semakin turun karena yang menekan bukanlah pasarnya tetapi regulasi yang membatasi pergerakan orang dan barang sepanjang PSBB diberlakukan.¹⁴

Adanya PSBB, terdapat beberapa penurunan harga, seperti harga ikan, sayur dan harga lainnya, disebabkan permintaan menurun.¹⁵

Hal yang sama juga dirasakan oleh Ibu Fatmawati selaku petani cabai yang mengatakan bahwa :

¹³Nasruddin (49), Ojol, Wawancara dilakukan oleh peneliti, 30 April 2020.

¹⁴ Wibowo Hadiwardoyo, *kerugian ekonomi nasional akibat PSBB*, (Jurnal : Of Business and Entrepreneurship 2, No 2, 2020), h.91.

¹⁵ Miftahul Ulum, *Enam hari PSBB Makassar, ini dampak ke ekonomi*, <https://surabaya.bisnis.com/read/20200429/531/1234316/enam-hari-psbb-makassar-ini-dampak-ke-ekonomi>, diakses pada tanggal 06 Mei 2020.

“Jadwal operasional pasar yang biasanya buka sampai sore kini dibatasi sampai jam 2 saja. Menurut ibu fatmawati sebelum adanya wabah ini harga cabai dipatok sekitar Rp 45.000 per kilogram, akan tetapi, saat ini harga cabai turun drastis menjadi Rp10.000 per kilogram, dan masalah bertambah karena pasar yang sekarang lebih cepat ditutup sehingga pembeli semakin sedikit ditambah adanya peraturan PSBB yang membuat beberapa masyarakat membatasi diri untuk berbelanja kebutuhan pokoknya saja.”¹⁶

Kebijakan pemerintah dengan PSBB, segala kegiatan masyarakat dihentikan sementara ternyata memiliki pengaruh yang kuat pada masyarakat. Terdapat masyarakat yang terdampak secara ekonomi, sebagai contoh yang disebutkan sebelumnya yaitu ojek online (ojol) tidak memiliki pendapatan karena tidak adanya orderan, pedagang baju dan pedagang kaki lima berhenti berjualan semenjak adanya wabah ini.

Dampak lainnya yang dirasakan pedagang kaki lima juga merasakan dampak diperlakukannya PSBB. Seperti yang kita ketahui pedagang kaki lima sangatlah bergantung kepada beberapa laku hasil dagangannya. Dengan adanya PSBB ini mereka pun tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya maupun kebutuhan sehari-harinya.

Dampak PSBB terhadap jalan transportasi juga ditutup, tidak keluar rumah, tidak berkantor, PHK di berbagai perusahaan. Oleh karena itu kegiatan ini butuh kesadaran oleh aparat kepolisian dan militer, serta masyarakat. Namun hal ini tidaklah mudah karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mendukung. Oleh karena itu sebelum memberlakukan karantina wilayah negara telah membuat berbagai kebijakan terkait perubahan anggaran negara, meningkatkan dana sosial, memastikan penanguhan kredit Bank, perpanjangan batas akhir pajak, memastikan anggaran BLT atau sembako digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁷

Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadaan di sejumlah daerah yang semakin menimbulkan banyaknya Virus Corona (Covid-19) ini membuat pemerintah mengambil sejumlah langkah, salah satunya adalah menerapkan sistem PSBB. Pembatasan kegiatan tersebut ditujukan bagi penduduk dalam satu wilayah yang diduga telah terkena atau terinfeksi Corona. Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dibuat untuk dapat menekan perkembangan Virus Corona (Covid-19) di Indonesia. Tentunya dengan adanya peraturan PSBB ini benar-benar bisa ditaati oleh masyarakat Indonesia, karena seperti yang kita ketahui bahwa ancaman Virus Corona (Covid-19) ini merupakan ancaman yang benar-benar nyata dan tidak memandang kalangan bawah hingga kalangan atas sekalipun.

¹⁶ Fatmawati (36) Pedagang, Wawancara dilakukan oleh peneliti 29 April.2020

¹⁷Ramli, dkk, *Coronology : Varian Analisis & Konstruksi Opini* (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 15-16.

Diterapkannya peraturan PSBB adalah suatu langkah kecil namun berarti besar, tetapi disisi lain juga memberikan dampak terhadap beberapa masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah karena sangat berpengaruh bagi ruang gerak mereka untuk mencari nafkah. Hal ini menyebabkan keresahan bagi para masyarakat yang pekerjaannya berada di luar, yang mengharuskan mereka untuk membatasi kegiatan di luar rumah, dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya.

Referensi:

- Ainun, Mardiyah Rahma. & Nurwati, R Nunung. 2020. *Dampak pandemi covid-19 terhadap peningkatan angka pengangguran di Indonesia*, Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Asih. Nurjanah. *Perubahan sosial-ekonomi akibat pandemi covid-19*, <https://www.kompasiana.com/asihftrn177793/5e994497d541df77e05aad82/perubahan-sosial-ekonomi-akibat-pandemi-covid-19>.
- Desi, Niasari. 2020, *Efek samping PSBB terhadap masyarakat*, Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Lexy, Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. 2014. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute.
- Miftahul, Ulum. *Enam hari PSBB Makassar, ini dampak ke ekonomi*, <https://surabaya.bisnis.com/read/20200429/531/1234316/enam-hari-psbb-makassar-ini-dampak-ke-ekonomi>.
- Muharom. 2020. *kebijakan Nabi Muhammad Saw mengenai wabah penyakit menular dan implementasi dalam konteks menanggulangi covid-19*. SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i, 7 (3).
- Putra. Dwi Aditiya. *PSBB tak berdampak besar ke ekonomi Indonesia*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4221693/psbb-tak-berdampak-besar-ke-ekonomi-indonesia>.
- Ramli. dkk. 2020. *Coronology: Varian Analisis & Konstruksi Opini* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* Cet. I; Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Thorik, Sylvia Hasanah. 2020. *Efektivitas pembatasan sosial berskala besar di Indonesia dalam penanggulangan Pandemi Covid-19*, Jurnal : Hukum dan Keadilan, 4 (1).
- Wahyudi. 2020, *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*, Universitas Sumatra Utara.
- Wibowo, Hadiwardoyo. 2020, *kerugian ekonomi nasional akibat PSBB*, Jurnal : Of Business and Entrepreneurship 2 (2).

Yunus, Nur Rohim; & Rezki, Annissa. 2020. *Kebijakan Pemerintah Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*. SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i 7 (3).

Indexed by :



MENDELEY



SSRN



SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu sosial dan kebudayaan dalam dimensi syariah, dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari para penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah dan atau lembaga afiliasi penulisnya

